

Judul : Kasus suap pembangunan jalan, KPK Bakal panggil anggota banggar DPR
Tanggal : Sabtu, 16 Juli 2016
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 5

KASUS SUAP PEMBANGUNAN JALAN

KPK BAKAL PANGGIL ANGGOTA BANGGAR DPR

Pekerjaan Komisi Infrastruktur dan Banggar di luar
jangkauan Sudiartana.

PROYEK RP 620 MILIAR YANG MEMICU BESEL

PROYEK pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat, yang diduga memicu suap, diusulkan sejak November 2015 ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini merupakan usulan program Dana Alokasi Khusus (DAK) sarana dan prasarana penunjang daerah tahun anggaran 2016, bidang transportasi infrastruktur jalan daerah.

Panjang jalan yang akan dibangun dalam proyek itu mencapai 74,68 kilometer. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Sumatera Barat, Ridha Sutrisna Putra, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan 12 ruas jalan itu mencapai Rp 620 miliar.

Berikut ini proyek 12 ruas jalan tersebut:

Muhamad Rizki

muhamad.rizki@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan

di Sumatera Barat. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan penyidik lembaganya memerlukan keterangan anggota Banggar untuk mendalami kasus tersebut. "Tujuan pemanggilan nanti adalah untuk mengetahui ada tidaknya pihak-pihak lain

yang terlibat," kata Priharsa di kantornya, kemarin.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada akhir Juni lalu. Tim KPK menangkap anggota Komisi Hukum DPR I Putu Sudiartana lantaran diduga menerima uang suap dari Yogan Askan, pengusaha asal Padang, Sumatera

Barat, yang ingin mendapatkan proyek pengerjaan jalan di daerahnya.

Pada awalnya, Suhemi, orang dekat Sudiartana, menawarkan pengamanan anggaran proyek pengerjaan jalan di Sumatera Barat kepada Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Sumatera Barat, Suprpto. "Suhemi menjual kedekatannya dengan anggota DPR," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Lantaran sudah berkomitmen, Suprpto mengumpulkan uang suap hasil saweran antara Yogan dan seorang pengusaha berinisial S. Setelah terkumpul, Suprpto mentransfer uang itu ke dua rekening.

Rekening pertama milik kerabat Sudiartana. Rekening lain milik Muchlis—suami Novianti, staf Sudiartana. Total uang yang ditransfer mencapai Rp 300 juta. KPK menyimpan tiga bukti transaksi uang tersebut.

Kemarin, KPK untuk

pertama kalinya memeriksa Sudiartana sebagai tersangka. Setelah diperiksa, politikus asal Bali itu enggan memberikan komentar. Pengacara Sudiartana, Muhammad Burhanuddin, mengatakan kliennya ditanya 24 hal seputar penyusunan.

Dugaan keterlibatan anggota DPR lain, menurut Burhan, sempat ditanyakan oleh penyidik KPK kepada Sudiartana. Pertanyaan itu muncul lantaran, sebagai anggota Komisi Hukum, Sudiartana tidak bisa menyentuh pekerjaan Komisi Infrastruktur. Selain itu, Putu bukan anggota Banggar. "Klien kami menyampaikan ke penyidik bahwa ia tidak memiliki kewenangan apa pun di Komisi Infrastruktur dan Banggar DPR," ujar Burhan. Karena itu, Burhan meminimalkan KPK segera memanggil para anggota DPR lain, termasuk Banggar, untuk memperjelas dugaan penyusunan itu.

Burhan membenarkan bahwa kliennya mengenal Suhemi, Ni Luh, dan Yogan. "Tapi, peran mereka apa, sampai sekarang kami belum tahu," ujar dia.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung sekitar sembilan jam itu, menurut Burhan, Sudiartana berkali-kali bertanya ke penyidik ihwal dugaan penyusunan itu. Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Sudiartana, Suhemi, Novianti, Suprpto, dan Yogan. Kemarin, selain memeriksa Sudiartana, penyidik KPK memeriksa Suhemi, Novianti, dan Suprpto.

Pengacara Suhemi, Aria Riefaldhy, mengatakan kliennya ditanya seputar hubungannya dengan Sudiartana. "Pertanyaan penyidik masih normatif," ujar dia. Aria juga mengatakan KPK perlu memanggil dan memeriksa para anggota DPR untuk memperjelas kasus.

Anggota Banggar DPR, Erna Suryani Ranik, mengimbau agar rekan-rekannya siap jika harus diperiksa KPK. Dia yakin pemberian keterangan dari Banggar akan memperjelas dugaan penyusunan Sudiartana. "Siapa pun kalau dipanggil harus siap, tidak ada yang istimewa," katanya.

● MUHAMAD RIZKI | ARKHELAUS

Rp 62 miliar